KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kembalikan Uang Negara yang Dicuri
Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Kembalikan Uang Negara yang Dicuri

MENTERI Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,7 triliun dari hasil pengungkapan kasus korupsi. Hal tersebut dapat dicapai dalam kurun waktu tiga bulan masa kerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa BG ini menjelaskan penyelamatan uang negara itu dilakukan berkat Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.

"Sejak desk itu dibentuk, pemerintah berhasil mengamankan Rp5,37 triliun dalam mata uang rupiah, Rp920 miliar dalam bentuk mata uang asing, dan emas logam senilai Rp84 miliar," paparnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, kemarin.

Jumlah itu belum termasuk hasil sitaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang terus bekerja sinergi dengan penegak hukum lain. Pihaknya juga berupaya memperbaiki tata kelola keuangan instansi pemerintah demi mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Perbaikan tata kelola dan *good governance* terus dilakukan agar tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi," katanya.

Selain memberantas korupsi, kata dia, pemerintah juga berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal senilai Rp3,7 triliun selama masa 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Itu dalam rangka memperkuat daya saing produk dalam negeri dari gempuran produk asing.

JANGAN TERLENA ANGKA

Penindakan itu dilaksanakan oleh Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Beberapa jenis barang yang disita di antaranya rokok ilegal, barang elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman keras, dan komoditas lain.

"Selain mengamankan beberapa barang bukti, juga berhasil menangkap 552 orang yang tergabung dalam sindikat perdagangan barang ilegal tingkat internasional," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Prabowo harus disikapi dengan kehati-hatian.

Pasalnya, angka dari beberapa lembaga survei seperti Indikator Politik Indonesia yang mengungkapkan kepuasannya mencapai 79,3% itu baru mencakup 100 hari kerja.

"Ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Puan mengapresiasi Presiden Prabowo terkait dengan hasil survei tersebut. Namun, dia mengingatkan agar program-program pemerintah ke depannya harus mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Itu, kata Puan, misalnya dengan memperbaiki tantangan teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. "Jadi, kami tetap kawal di DPR agar pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak," tukasnya. (Ant/I-2)